

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **A. Tujuan dan Sasaran**

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada paradigma reformasi birokrasi.

Tujuan : a. Meningkatkan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi.

Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.  
: 2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan : b. Meningkatkan pelayanan publik.

Sasaran : 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat.  
: 2. Meningkatnya aparatur yang kompeten dan berjiwa melayani.

Tujuan : c. Optimalisasi kelembagaan, tata laksana dan akuntabilitas.

Sasaran : Penguatan ketata laksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Tujuan : d. Meningkatnya profesional dan kesejahteraan aparatur.

Sasaran : Mengembangkan kompetensi aparatur.

Tujuan : e. Peningkatan kesadaran hukum.

Sasaran : Melaksanakan penataan perundang-undangan.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada perangkat daerah.

Tujuan : a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi.

Sasaran : Meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Tujuan : b. Meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Sasaran : Meningkatnya kerukunan berbasis adat dan agama.

Tujuan : c. Meningkatkan kualitas layanan, administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka

mewujudkan pelayanan prima.

Sasaran : Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan,  
pembangunan dan kemasyarakatan.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Tujuan : Membangun pola sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi.

Sasaran : Meningkatnya hubungan kerja.

## **B. Program dan Kegiatan**

### **1. Program**

Program Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- f. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
- g. Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan
- h. Program Fasilitas Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- i. Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah
- j. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan
- k. Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat
- l. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- m. Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat.

- n. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- o. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- p. Program Penataan Peraturan Perundang –undangan
- q. Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah
- r. Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian
- s. Program Kerjasama Pembangunan

## **2. Kegiatan**

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan perkembangan pada tingkat implementasi dan memperhatikan perkembangan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 maka disusunlah rencana kegiatan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru untuk Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

### **a. BAGIAN UMUM**

#### **1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- c). Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f). Penyediaan Makanan dan Minuman
- g). Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- h). Penyediaan Jasa Non PNS

#### **2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a). Pembangunan Gedung Kantor
- b). Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c). Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d). Pengadaan Mebeleur
- e). Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

- f). Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
  - g). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - h). Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
  - i). Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  - j). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
  - k). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - l). Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
  - m). Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
  - n). Penyediaan Sewa Rumah Dinas Pejabat
  - o). Pengamanan Gedung Kantor
- 3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
- a). Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - b). Pengadaan Pakaian Adat
- 4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- a). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b). Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
  - c). Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset /Barang

**b. BAGIAN HUKUM**

**1). Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**

- a). Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
- b). Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- c). Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- d). Publikasi Peraturan Perundang-undangan
- e). Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

- f). Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perjanjian Kerjasama / MOU
- g). Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi
- h). Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM

**c. BAGIAN PEMERINTAHAN**

**1). Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah**

- a). Dialog /Audiensi Dengan tokoh –tokoh Masyarakat Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.
- b). Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**2). Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah**

- a). Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional

**3). Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan.**

- a). Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
- b). Pembinaan Administrasi Pemerintahan di Bawahnya

**d. BAGIAN ORGANISASI**

**1). Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah**

- a). Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah
- b). Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
- c). Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

**2). Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan**

- a). Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru
- b). Penyusunan Produk Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
- c). Penyusunan Laporan Kinerja ,Perjanjian Kinerja dan Laporan Standar Pelayanan Minimal

- d). Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- e). Asistensi/Pendampingan Penyusunan Rancangan & Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) AP dan Standar Pelayanan (SP) SKPD
- f). Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan

**e. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL**

**1). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah**

- a). Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
- b). Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
- c). Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan
- d). Publikasi Kegiatan Pimpinan
- e). Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

**f. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

**1). Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah**

- a). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

**2). Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian**

- a) Peningkatan Koordinasi Pengembangan UKM
- b) Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah
- c) Koordinasi BUMD dan Kajian Investasi
- d) Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah
- e) Koordinasi Penanganan Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian

- f) Koordinasi Pelaksanaan Administratif Perekonomian Daerah dan Perbankan

**3). Program Kerjasama Pembangunan**

- a) Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha

**g. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**1). Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat**

- a). Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
- b). Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya
- c). Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
- d). Fasilitasi Bantuan Sosial
- e). Pembinaan dan Pengembangan UKS

**2). Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat**

- a). Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan

**3). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

- a). Pelaksanaan Santunan Kematian
- b). Pelaksanaan Rukun Kematian

**h. BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN**

**1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**

- a) Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik

**2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah**

- a) Pembakuan Nama Rupa Bumi

- b) Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah
- c) Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sertifikasi Tanah

**i. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**1). Program Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa**

- a) Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- b) Koordinasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- c) Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru memiliki tanggungjawab dalam menggunakan sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban Stakeholder pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi pada pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Selanjutnya media akuntabilitas merupakan media pertanggungjawaban yang dapat menjadi alat oleh pihak yang memberi kewenangan untuk menilai kinerja pejabat pemerintah.

Perlunya akuntabilitas semakin mencuat seiring dengan tuntutan untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.